



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

http://kliping.dpr.go.id

Judul	: Alasan lebih efisien & tingginya biaya politik, wacana pilkada lewat DPRD menuai pro kontra
Tanggal	: Selasa, 30 Desember 2025
Surat Kabar	: Rakyat Merdeka
Halaman	: 2

Alasan Lebih Efisien & Tingginya Biaya Politik

Wacana Pilkada Lewat DPRD Menuai Pro Kontra

Wacana proses pemilihan pilkada melalui DPRD juga perbincangan dan menuai pro kontra di publik. Ada yang mendukung, ada juga yang menolak.

Sekjen Partai Gerindra, Sugiono termasuk yang mendukung gagasan pilkada lewat DPRD. Ia beralasan, pilkada melalui DPRD bisa lebih efisien, mudah dari proses atau waktu penjaringan kandidat, mudah dalam pengawas dan angkos politik, hingga mengurangi suara. "Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan

pemilihan ini oleh DPRD di tingkat bupati/wali kota ataupun di tingkat gubernur," kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono dalam keteranganannya, Minggu (28/12/2025).

Sugiono menyebut, pada 2015, dana hibah dari APBD untuk pelaksanaan pilkada hampir Rp 7 triliun. Angka itu terus meningkat hingga pada 2024 dana hibah dari APBD untuk pelaksanaan pilkada mencapai lebih dari Rp 37 triliun.

"itu merupakan jumlah yang bisa digunakan untuk hal-hal lain yang sifatnya lebih produktif, upaya-upaya peningkatan kesejahteraan

dan ekonomi rakyat. Saya kira ini adalah sesuatu yang perlu kita pertimbangkan," tuturnya.

Berbeda, Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah menegaskan mengubah mekanisme pilkada dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan oleh DPRD tidak bisa diputuskan secara tergesa-gesa dan harus dikaji secara mendalam.

"Jangan sampai kita membuat kebijakan yang tidak sesuai dengan polistik seseorang," kritik Said.

Senada, Wakil Presiden Partai Buruh Said Salahuddin mengungkapkan, mayoritas partai

yang tergabung dalam Gerakan Kedaulatan Surya Rakyat (GKSR) menolak pilkada melalui DPRD.

"Personel-persorlson itu tidak berkorlasi dengan hak rakyat. Problematika bukan pada hak mililih, melainkan pada sistem aturan main dan terutama pada pelaksanaannya," ujar Salahuddin.

Di tengah polemik mengenai gagasan pilkada melalui DPRD, Wakil Ketua Baleg DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan usul pilkada nanti hanya memilih kepala daerahnya saja, wakilnya tidak.

"Saya sendiri mengusulkan agar pilkada hanya untuk memilih kepada daerahnya saja," ucap Doli. Kepada daerahnya saja" usul Doli. Keputusana mengusulkan Kornas JPPR Rendy Umboh terkait dengan usulan Doli Kurnia? Ia tidak mempermaksakan jika di dalam pemilihan pilkada nanti hanya memilih kepala daerah saja. "Tidak ada masalah," ujar dia.

Yang terpenting adalah pemilihan kepala daerahnya secara langsung, bukan melalui DPRD.

Untuk lebih jelasnya, berikut wacana Rendy Umboh dan Ahmad Doli Kurnia terkait wacana di pilkada hanya memilih kepala daerahnya saja, sementara wakilnya tidak dipilih.

AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, Wakil Ketua Baleg DPR

RENDY UMBOH, Kornas JPPR

Pastinya, Rakyat Tetap Akan Dilibatkan Kok... Banyak Yang Salah Tafsirkan Demokrasi



DOC 15/PERPU

DOC 15/PERPU

Anda mengusulkan agar pilkada hanya memilih kepada daerahnya saja, wakilnya tidak. Apa yang selanjutnya? Memang, setiap sifatnya yang selanjutkan agar pilkada kala itu untuk memilih kepada daerahnya saja.

Bukan paket, dong? Iya, bukan paket kepala dan wakil kepada daerah.

Soal sistemnya apakah melalui DPRD atau secara langsung biasanya? Dalam pilkada, tim merekomendasikan ada 3 opsi. Opsi pertama, pelaksanaan pilkada tetap secara langsung seperti saat ini dengan sistem ganda, namun berlaku wakilnya. Opsi kedua, pelaksanaan pilkada oleh DPRD, yang selanjutnya memilih kepala dan pilkada secara *asymmetric-hybrid* atau pilkada lewat DPRD.

Menurut Anda, apakah pemilihan hanya kepada daerahnya saja ini dimulai dalam Undang Undang Pemilu? Ya kira, karena setiap pilkada harus dilakukan oleh DPRD, maka seumur auran tersebut juga harus diatur di dalam undang-undang.

Soal rekomendasi dari Partai Golkar, bagaimana?

DPR RI dan Golkar sebenarnya tidak berbeda. Tim Kajian Politik sudah sejaknya selama 1,5 tahun dan sudah menghasilkan beberapa opsi rekomendasi tentang sistem pemilu, parpol, termasuk pilkada.

Untuk pilkada, tim merekomendasikan ada 3 opsi. Opsi pertama, pelaksanaan pilkada tetap secara langsung seperti saat ini dengan sistem ganda, namun berlaku wakilnya. Opsi kedua, pelaksanaan pilkada oleh DPRD, yang selanjutnya memilih kepala dan pilkada secara *asymmetric-hybrid* atau pilkada lewat DPRD.

Pemilihan yang mengandung pemihakan pada partai politik di DPRD, yang utama adalah terkait tingginya biaya politik dalam pilkada langsung.

Sekalipun pemilihan akhirnya dilaksanakan oleh anggota DPRD, namun sebelumnya bisa dibuat tahapan yang bisa melibatkan publik.

“

“

Legislatif itu fungsiya hanya tiga yakni legislasi, anggaran dan pengawasan. Bukan memilih eksekutif. Lucu sekali kalau legislatif memilih eksekutif.

Bukan hanya biaya penyelenggarannya saja, namun juga biaya politik "lainnya" yang juga jauh lebih tinggi.

Berarti ada opsi secara langsung? Sementara tetapi dimasukkannya opsi pilkada secara langsung karena tidak memihakan prinsip-demokrasi (pelibatan rakyat), serta prinsip de-centralisasi dan dekonsentrasi dalam pelaksanaan otomasi daerah kita.

Berkalangan, banyak partai yang mendukung pilkada melalui DPRD.

Kami, Tim Kajian Politik sebenarnya juga sudah mempersiapkan "konsep baru" bagi opsi pilkada melalui DPRD. Seperti ini yang kita lakukan dan mengungkapkan dua prinsip, yaitu prinsip demokrasi (pelibatan rakyat) dan prinsip penganggaran pilkada yang yang dimaksud dengan sistem ganda, namun berlaku wakilnya.

Jadi memang tidak ada nomenklatur terkait wakil gubernur, wakil bupati, wakil wali kota, atau wakil kepala daerahnya saja.

Oleh karena itu, apapun desainnya, apakah kepala daerah, dalam hal ini

Ada usulan dari Wakil Ketua Baleg DPR, jika pilkada nanti yang dipilih kepada daerahnya saja. Apa pendapat Anda?

Kalau pilkada dipilih secara langsung, dan hanya yang dipilih kepada daerah saja, berarti gubernur, bupati, wali kota itu dipilih oleh wakilnya saja. Tidak ada masalah.

Asalkan dipilih secara langsung, kan?

Iya. Sepanjang dalam tafsir kita adalah dipilih secara langsung, bukan oleh DPRD. Soal desain apakah paket atau hanya kepala daerahnya saja tidak ada masalah.

Selain karena sesuai dengan aturan, faktor apa saja yang membuat Anda setuju dengan usulan kepala daerahnya saja yang dipilih?

Sejak pertama kali digelar 2005 sampai sekarang, itu seolah konsolidasi konsolidasi dan pengembangan pada dasah.

Gubernur berantem dengan wakil gubernur, bupati dengan wakilnya, wali kota dengan wakilnya.

Dari itu terjadi kongruensi.

Oleh karena itu baik juga gubernur aja, bupati, wali kota yang dipilih secara langsung tidak usah paket. Ya itu tidak ada masalah, tetapi konstitusional.

Nah sekarang pertanyaannya, wali gubernur, bupati, wali kota ada masalah, digantikan oleh slapa?

Jika hal itu terjadi, maka partai politik yang mengusulkan kembali.

Terakhir, apa pesan Anda?

Pesan saya, pilkada tetap di DPRD jangan dipilih oleh DPRD.

Juga demokratis, itu sebenarnya keliru.

Karena kita tahu bahwa konstitusional.

Jadi ada triknya, yakni.

Yakni yudikatif, eksekutif dan legislatif.

Legislatif itu fung